

**MODAL POLITIK AGIL SIRADJ AHMAD CALEG DAPIL I  
KABUPATEN KOLAKA DALAM PEMILU 2024**



**MUHAMMAD RAIHAN KAMAL**

**E041201020**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**MODAL POLITIK AGIL SIRADJ AHMAD CALEG DAPIL 1  
KABUPATEN KOLAKA DALAM PEMILU 2024**

**MUHAMMAD RAIHAN KAMAL  
E041201020**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

## **HALAMAN PENGANTAR**

**Modal Politik Agil Siradj Ahmad Caleg Dapil 1 Kabupaten  
Kolaka Dalam Pemilu 2024**

**MUHAMMAD RAIHAN KAMAL  
E041201020**

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2024**

HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI

MODAL POLITIK AGIL SIRADJ AHMAD CALEG DAPIL 1  
KABUPATEN KOLAKA DALAM PEMILU 2024.

Yang Diajukan Oleh :



MUHAMMAD RAIHAN KAMAL

E041201020

Menyetujui:

Mengetahui:

Pembimbing Tugas Akhir,

Ketua Departemen Ilmu Politik,

*13 VIII 2024.*

Dr. Sakirah Nadir, S.IP., M.Si

Prof. Muhammad Al Hamidi,

Dr. Sakirah Nadir, S.IP., M.Si

NIP. 19710917199703100

NIP. 197912182008122002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raihan Kamal

NIM : E041201020

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Modal politik Agil Siradj Ahmad Caleg Dapil I Kabupaten Kolaka dalam Pemilu 2024" adalah benar merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan pengambilan tulisan atau hasil pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikuteip tanpa persetujuan atau menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Lasusua, 11 Oktober 2024



Muhammad Raihan Kamal

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Politik.

Pertama-tama, dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya, **H. Ir. Kamal Mustafa, S.Pi, M.M** dan **H. Hapida, S.Pdi**. Terima kasih atas doa, cinta, dukungan, dan pengorbanan yang telah kalian berikan selama ini. Segala perjuangan saya tidak akan mungkin berhasil tanpa kehadiran dan kasih sayang kalian berdua. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup saya.

Selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada **Prof. Muhammad Alhamid, S.IP, M.Si** selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas bimbingan, waktu, dan perhatian yang Bapak berikan selama proses penulisan skripsi ini. Nasihat dan masukan Bapak sangat berharga dalam memandu saya menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Tidak lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman, kerabat, dan keluarga besar dari **Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Isipol Unhas, HIMAPOL FISIP UNHAS, IPMIL RAYA UNHAS**, serta **HIPMI PT UNHAS**. Terima kasih atas dukungan moral, semangat, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama masa studi saya. Kebersamaan dan solidaritas kita telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini, yang memberi warna dan kekuatan tersendiri bagi saya untuk terus berjuang hingga akhir.

Akhir kata, saya berharap segala dukungan, doa, dan ilmu yang telah diberikan kepada saya mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Terima kasih.

Penulis,

Muhammad Raihan Kamal

## **ABSTRAK**

**Muhammad Raihan Kamal E041201020, *Modal Politik Agil Siradj Ahmad Caleg Dapil I Kabupaten Kolaka dalam Pemilu 2024.* Di bawah bimbingan **Bapak Muhammad.****

Tujuan Penelitian ini adalah ingin memberikan pemahaman mendalam mengenai modal Agil Siradj Ahmad dalam memenangkan pemilihan anggota legislatif dalam pemilihan umum 2024. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari salah satu ahli yaitu Pierre Bourdieu yang menjelaskan konsep Habitus, Arena, dan beberapa modal yang digunakan dalam strategi politik. Dasar Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dan tipe penelitian ini memberikan gambaran secara jelas mengenai dinamika yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Teknik analisis keabsahan data, peneliti menguji kredibilitasnya dengan teknik analisis data dengan cara yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun sumber data yang didapatkan peneliti meliputi data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa modal yang digunakan Agil Siradj Ahmad ada empat yaitu, Modal ekonomi, Modal Sosial, Modal budaya (Culture), dan Modal Simbolik. Modal ekonomi meliputi harta benda yang dimiliki oleh Agil Siradj Ahmad. Modal Sosial yang dimiliki oleh Agil Siradj Ahmad yaitu ketokohan ayahnya sebagai mantan bupati Kolaka. Modal budaya (culture) yang dimiliki dalam hal ini berlatar belakang sebagai mahasiswa lulusan ilmu Hukum UMI yang mendapatkan pengalaman mengenai dinamika politik selama berstatus mahasiswa. Sedangkan Modal Simbolik yaitu Agil Siradj Ahmad dikenal sejak dulu dikarenakan telah membentuk slogan ASA (Agil Siradj Ahmad) sejak dulu dan slogan ini digunakan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Agil, keluarga maupun temannya.

**Kata Kunci: Modal Politik, Pierre Bourdieu, Habitus, Arena**

## **ABSTRACT**

**Muhammad Raihan Kamal E041201020, Political Capital Agil Siradj Ahmad Candidate for Dapil I Kolaka Regency in the 2024 Election. Under the guidance of Mr. Muhammad.**

The purpose of this research is to provide an in-depth understanding of Agil Siradj Ahmad's capital in winning the legislative election in the 2024 general election. The theory used in this research is the theory of one of the experts, Pierre Bourdieu, who explains the concept of Habitus, Arena, and some capital used in political strategy. Basis of this research uses a qualitative method with a descriptive type of research, and this type of research provides a clear picture of the dynamics studied based on the experience experienced by the informant. The data analysis technique is by interview and documentation. In ensuring the validity of the data, the researcher tested its credibility with data analysis techniques in the following ways, namely, data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The data sources obtained by the researcher include primary data and secondary data. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the capital used by Agil Siradj Ahmad is four, namely, Economic Capital, Social Capital, Cultural Capital, and Symbolic Capital. Economic capital includes property owned by Agil Siradj Ahmad. The Social Capital owned by Agil Siradj Ahmad is the character of his father as the former regent of Kolaka. The cultural capital possessed in this case is based on the background of UMI Law graduates who have gained experience in political dynamics while as a student. Meanwhile, Symbolic Capital, namely Agil Siradj Ahmad, has been known for a long time because it has formed the slogan ASA (Agil Siradj Ahmad) since a long time ago and this slogan is used in every activity carried out by Agil, his family and friends.

**Keywords: Political Capital, Pierre Bourdieu, Habitus, Arena**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	17
1.3. Tujuan Penelitian .....	18
1.4. Manfaat Penelitian .....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA .....	20
2.1. Penelitian Terdahulu.....	20
2.2. Kerangka Teori .....	22
2.2.1. Habitus .....	23
2.2.2. Arena .....	25
2.2.3. Modal.....	29
2.3. Skema Pikir.....	32
2.4. Skema Penelitian .....	37
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN .....	38
3.1. Jenis dan Tipe penelitian .....	38
3.2. Lokasi dan Objek penelitian .....	40
3.3. Jenis dan Sumber data.....	41
3.4. Informan Penelitian .....	41
3.5. Teknik Analisis data .....	42
BAB IV .....	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44

4.1.	Kondisi Umum Kabupaten Kolaka.....	44
4.2.	Gambaran Umum Pemilihan Legislatif 2024 Kabupaten Kolaka .....	47
4.2.1	Sebaran Daerah Pemilihan .....	47
4.2.2	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kolaka .....	47
4.2.3	Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Legislatif di Kabupaten Kolaka.....	50
4.3.	Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).....	53
4.4.	Profil Agil Siraj Ahmad .....	56
4.5.	Konsep Habitus Agil Siradj Ahmad dalam memenangkan pemilihan Legislatif dapil I kabupaten Kolaka .....	59
BAB V .....		89
KESIMPULAN DAN SARAN .....		89
5.1.	Kesimpulan .....	89
5.2.	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....		90
LAMPIRAN .....		94

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Fenomena dalam skala perpolitikan di konteks ke Indonesian hari ini merupakan wujud demokrasi dan aktualisasi diri seseorang dalam mengambil, memberikan dan menunaikan hak kewarganegaraannya. Politik merupakan suatu bentuk disiplin pengetahuan yang memberikan gambaran bahwa selalu ada pertarungan ide/gagasan, strategis dan taktis sehingga aktor yang di pilih dan memilih lazimnya memiliki faktor – faktor yang memberikan arah kebijakan dan keputusan dalam konteks kenegaraan.

Dalam kaca mata sempitnya, sebagian esensi dalam memahami disiplin pengetahuan politik ini di lihat sebagai kegiatan yang berorientasi pada penata kelolaan sesuatu sehingga pada aspek tertentu sesuatu bisa di sah kan (kepentingan). Istilah yang tepat dalam pengertian tersebut bahwa kita manusia adalah zoon politicon. Zoon Politicon merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Kata Zoon Politicon merupakan padanan kata dari kata Zoon yang berarti "hewan" dan kata politicon yang berarti "bermasyarakat". Secara harfiah Zoon Politicon berarti hewan yang bermasyarakat. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan.

Politik merupakan ujung tombak pengambilan keputusan dalam khayalak orang banyak. Dalam sistem politik, kita tak lazim lagi mendengar istilah demokrasi. Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata tersebut memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Abraham Lincoln tiga faktor yang merupakan tolok ukur umum sebuah pemerintahan demokratis dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan

- mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum.
2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite demokrasi.
  3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi merupakan proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran, dan penghayatan. Demokrasi merupakan bentuk pembiasaan sosial yang berkaitan dengan hubungan manusia untuk membentuk demokrasi yang ideal seperti pendapat John Dewey (1964: 86) terdapat dua elemen dalam demokrasi yang ideal, tidak hanya berkaitan dengan kepentingan umum tetapi mengandalkan pada pengakuan kepentingan bersama dan tidak hanya interaksi kelompok- kelompok sosial tetapi perubahan dan pembiasaan sosial.

Asal usul demokrasi sebagai suatu sistem politik dapat ditelusuri sejak lima abad Sebelum Masehi, ketika orang-orang Yunani yang membentuk polis (negara-kota) mencoba menjawab pertanyaan bagaimana suatu sistem politik harus diorganisasikan agar dapat memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama masyarakat. Sejak itu, demokrasi menjadi spesies politik yang mengalami gelombang pasang dalam perjalanan sejarah dunia.

Demokrasi pertama kali dipraktekkan dan menjadi kebudayaan Yunani Kuno sebagai gagasan mengenai kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem demokrasi yang terdapat di negara-kota (city-state) Yunani Kuno (abad ke 6 sampai abad ke 3 s.M) merupakan demokrasi langsung (diret democracy) yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara sedikit hanya 300.000 penduduk dalam satu negara-kota). Lagipula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku.

Dalam negara modern demokrasi dapat bersifat langsung, dan juga bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan, (Budiardjo, 1982:50).

Demokrasi yang dipraktikkan di Yunani Kuno adalah demokrasi langsung yang dipraktikkan dalam suatu negara kota yang kecil misalnya Athena dan Sparta. Para warganya walaupun tidak seluruhnya ikut serta dalam pembuatan keputusan-keputusan politik secara langsung, sebagai suatu working model demokrasi yang dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip operasional. Sudah tentu harus dicatat bahwa demokrasi model Yunani Kuno adalah demokrasi yang sangat terbatas apabila dibandingkan dengan demokrasi modern. Beberapa tokoh demokrasi Yunani Kuno antara lain adalah Solon tokoh pembuat hukum (638-558 SM), Cleisthenes bapak demokrasi Athena (508 SM), Pericles Jenderal negarawan (490-429 SM), dan Demosthenes negarawan orator (385-322 SM). Masing-masing dengan kemampuannya membela demokrasi sebagai suatu sistem politik yang terbaik. Hanya saja serajah Yunani menunjukkan bahwa periode demokrasi lebih sering merupakan periode perkecualian, dimana yang mewarnai kehidupan politik Yunani pada beberapa abad Sebelum Masehi itu adalah sistem keditaktoran, tirani atau oligarki, baik sipil maupun militer. Bahkan benih-benih dan kecenderungan demokrasi Yunani itu akhirnya hancur ketika negara-kota Sparta yang otoriter mengalahkan negara-kota Athena dalam perang Peloponnesia yang berlangsung selama 27 tahun yakni 431-404 SM, (Rais, 1986:9).

Pada masa itu kritik tajam terhadap demokrasi dilontarkan oleh tokoh-tokoh pemikir seperti Plato dan Aristotle. Kedua filosof ini bukan pendukung demokrasi, tetapi melakukan kritik terhadap demokrasi. Keduanya menganggap bahwa berdasarkan pengamatan mereka pada praktek demokrasi di Athena, bahwa demokrasi adalah suatu bentuk sistem politik yang "berbahaya" dan "tidak praktis". Plato mendambakan suatu aristokrasi yang dipimpin oleh seorang raja-filosof dengan perhitungan bahwa seorang raja sekaligus filosof mempunyai berbagai kelebihan, keutamaan dan pandangan jauh ke depan. Sedangkan Aristotle yakin bahwa suatu pemerintahan berdasarkan pilihan orang banyak dapat mudah dipengaruhi oleh para demagog atau kelompok tertentu sehingga akhirnya merosot menjadi keditaktoran. Bahkan menurut Aristotle bahwa demokrasi dengan mudah meluncur ke arah tirani. (Rais, 1986:9).

Dua puluh tiga abad setelah eksperimen demokrasi Yunani Kuno khususnya di negara-kota Athena, dunia menyaksikan berbagai bentuk

sistem politik yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan yang mendominasi panggung sejarah dunia adalah monarki, principalities, kesultanan, dan negara-negara teokratik, sementara eksperimen demokrasi dapat dikatakan sudah tenggelam dalam sejarah. Puncak peradaban di India, Cina, Timur Tengah semasa kejayaan Islam dan kebangkitan Eropa tidak berhutang budi sedikitpun pada konsep demokrasi. Bahkan Republik Romawi yang tampil sesudah masa Yunani berakhir, gagal menerapkan mekanisme demokrasi ala Athena. Para pemikir terkemuka Romawi seperti Cicero dan Seneca tidak pernah merekomendasikan demokrasi, karena menurut mereka demokrasi merupakan suatu sistem yang inferior dan tidak praktis. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting yaitu Magna Charta (Piagam Besar) pada tahun 1215. Magna Charta merupakan semacam kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris dimana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikatkan diri untuk untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan privileges dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Walaupun piagam itu lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi. (Budiardjo, 1982:54).

Pada akhir abad 15 dan abad 16, sebagai awal dari zaman Renaissance di Eropa yang muncul konsep dan teori politik yang mulai mempertanyakan segi-segi manusiawi dalam hubungan antara penguasa dan rakyat serta kedudukan agama dalam masalah-masalah publik. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusasteraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama abad pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan kearah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik di bidang spiritual dalam bentuk dogma, maupun di bidang sosial dan politik. Hasil dari pergumulan ini, timbulnya gagasan mengenai perlunya ada kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya di bidang pemerintahan. Ini dinamakan "Pemisahan antara Gereja dan Negara". (Budiardjo, 1982:55).

Perkembangan perjuangan rakyat pasca piagam magna charta dan masa renaissance mempersiapkan Eropa Barat pada masa 1650-1800 menyelami masa "Aufklarung" (Abad Pemikiran) beserta Rasionalisme, suatu aliran pikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia dari batasbatas yang ditentukan oleh gereja dan mendasarkan pemikiran atas akal (ratio) semata-mata. Kebebasan berpikir membuka jalan untuk meluaskan gagasan di bidang politik. Timbulah gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik yang secara nyata tidak boleh diselewengkan oleh raja dan berimplikasi adanya lontaran berbentuk kecaman-kecaman terhadap raja, yang menurut pola yang sudah lazim pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas. Kecaman-kecaman yang dilontarkan terhadap gagasan absolutisme mendapat dukungan kuat dari golongan menengah (middle class) yang mulai berpengaruh berkat majunya kedudukan ekonomi serta mutu pendidikannya. (Budiardjo, 1982:55).

Barulah pada zaman Pencerahan (Enlightenment) dimasa abad 17 dan 18 pemikiran-pemikiran demokrasi muncul di atas permukaan. John Locke, Jean Jacques Rousseau, Charles Louis Montesquieu, John Stuart Mill dan lain-lain mulai menolak absolutisme monarki dan kekuasaan suci dari para penguasa. Sementara itu di Amerika, Thomas Jefferson sangat menekankan kedaulatan rakyat. Tema-tema pemikiran politik pada zaman pencerahan berkisar pada masalah-masalah kebebasan, keadilan, hak-hak asasi manusia, pembatasan atas kekuasaan pemerintahan, hak untuk memberontak terhadap kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Masa ini dapat dikatakan sebagai masa peletakan fondasi bagi demokrasi modern seperti yang kita kenal sekarang.

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada dimensi pembangunan bangsa, praktek demokrasi diharapkan dapat memberikan penguatan semangat kebangsaan bagi keseluruhan komponen bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan yang utuh dan tanggung jawab untuk tetap meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam memajukan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu bacaan tentang demokrasi dan kebangsaan menjadi penting untuk dipahami oleh seluruh warga masyarakat.

Secara konseptual dan empirik, demokrasi akan tumbuh dan berkembang secara optimal, manakala didukung oleh peradaban masyarakat negara setempat yang membuka ruang terbentuknya proses demokratisasi. Peradaban masyarakat dapat bersumber dari bawaan

manusia hasil interaksi dengan lingkungannya, juga merupakan hasil pelaksanaan program modernisasi yang dilakukan oleh pemerintahan dalam berbagai aspek kehidupan. Sejarah dunia mencatat bahwa berbagai peradaban manusia yang mendukung tata kehidupan yang demokratis, adalah hasil dari konstuksi kebijakan pemerintahan dalam melakukan modernisasi atau reformasi tata kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi negara demokrasi yang moderen, manakala adanya komitmen bangsa yakni pemerintah bersama masyarakat untuk menerapkan sistem pemerintahan demokrasi dalam skala besar guna mengembangkan demokrasi, yang diikuti dengan perubahan kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi.

Kiranya mudah dipahami bahwa berbagai gerakan revolusi politik yang muncul pada masa itu membuka jalan bagi demokrasi. Pemikiran dan gerakan revolusi sosial, politik, ekonomi dan filsafat di Eropa yang berkembang pada abad 17 dan 18 secara langsung atau tidak langsung telah mendorong perubahan-perubahan besar di Inggris, Perancis dan Amerika. Absolutisme monarki di Inggris diserang dengan gencar sampai munculnya parlemen di negara ini dengan mengambil bentuk House of Lords dan House of Commons sebagai lembaga pilihan rakyat yang masih terbatas. Kendatipun demikian, lembaga-lembaga ini dalam kenyataan semakin mempraktekkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan monarki Inggris. Bersamaan dengan itu, revolusi Amerika mengukuhkan cita-cita demokrasi dalam Deklarasi kemerdekaannya pada 1776 dan merumuskan cita-cita demokrasi secara lebih lengkap dalam konstitusi 1787. Sementara gerakan revolusi Perancis pecah pada 1789 dengan semboyan sangat terkenal, yaitu kebebasan, persamaan dan persaudaraan (*liberte, egalite, fraternite*). Tiga semboyan yang kemudian menjadi akar demokrasi itu menyebar ke pelbagai penjuru dunia dan menumbuhkan inspirasi pada banyak bangsa untuk mencari alternatifdemokratik bagi sistem politik lama.

Perjalanan dan perjuangan panjang untuk menegakkan praktek demokrasi di Eropa dan Amerika, menurut Barrington Moore, Jr., adalah jalan demokratik (*the democratic route*) dengan revolusi borjuis yang ditandai dengan kapitalisme dan demokrasi parlemen. Jalan kedua menuju dunia moderen adalah juga bersifat kapitalis, dan sekaligus reaksioner dengan "revolusi dari atas" yang berkulminasi pada fasisme. Rute kedua ini ditempuh oleh Jerman dan Jepang menjelang Parang Dunia II. Jalan ketiga adalah rute komunis dengan revolusi petani yang disokong sampai

tahap tertentu oleh kaum buruh, seperti diambil oleh Rusia dan Cina. (Rais, 1986:15).

Negara Indonesia adalah negara bangsa (nation state) yang dibangun atas dasar keanekaragaman suku-suku bangsa. Dalam kondisi Keanekaragaman suku bangsa, bangsa Indonesia telah bertekad untuk hidup dalam tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa yang satu 3 yaitu Indonesia, dengan dasar semboyan Bhineka Tunggal Ika. Guna mewujudkan dan memantapkan paham kesatuan atas dasar perbedaan, diperlukan pola wawasan kebangsaan Indonesia yang utuh.

Dalam perwujudan demokrasi di Indonesia, salah satu kegiatan yang di nanti – nanti masyarakat setiap lima tahun sekali yakni Pemilu dan Pilpres. Pesta politik per lima tahunan tersebut sangat menjadi momentum besar masyarakat dalam memilih dan menyambut estafet aktor baru atau aktor yang berhasil mempertahankan status quo kekuasaannya. Legislatif dan Eksekutif sebagai lembaga yang di pilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme Pemilu dan Pilpres merupakan sepuncak harapan sekaligus musibah bagi para aktor untuk mengemban amanah yang telah di berikan.

Secara umum Pemilu merupakan representasi dari konsep demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, kesetaraan dalam segala hal dan berkeadilan yang harus dilaksanakan oleh pejabat negara. Dalam perjalanannya yang panjang, bangsa Indonesia pada saat ini telah bebas dari belenggu Orde Baru yang terkesan tidak mewujudkan kedaulatan kepada rakyat. Setelah dilakukan reformasi, bangsa Indonesia mencita-citakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam perjalanannya yang panjang, Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali, baik secara tidak langsung maupun secara langsung dan melalui Pemilu serentak dengan berbagai macam bentuk dan model kepemimpinan yang dilahirkan dari hasil pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dalam perjalanan sistem demokrasi dan Pemilu di Indonesia sejak era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Pemilu Orde Lama Pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta berkeinginan menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Parlemen dan Konstituante pada awal tahun 1946, sebagaimana disebutkan dalam Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 3 November 1945 yang

menganjurkan pembentukan partai politik.

Namun Pemilu tidak dapat dilaksanakan karena masih rendahnya stabilitas keamanan negara pasca kemerdekaan, di samping itu juga karena belum adanya perangkat Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu. Pemilu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955 sebagai Pemilu pertama yang bertepatan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada tahun 1955 dilaksanakan dua kali Pemilu, yaitu pemilihan Parlemen pada tanggal 29 September 1955 dan pemilihan Konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Adapun landasan hukum Pemilu pertama adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerapkan asas langsung, bebas, jujur, kebersamaan, umum dan rahasia. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa Pemilu ditujukan untuk memilih anggota bikameral yaitu Parlemen dan Konstituante dengan sistem perwakilan proporsional dan setiap daerah pemilihan akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya.

Sistem penghitungan penetapan anggota Parlemen adalah jumlah total penduduk Indonesia dibagi 300 ribu kemudian dibulatkan, penetapan anggota Konstituante adalah jumlah total penduduk Indonesia dibagi 150 ribu kemudian dibulatkan. Pemilu untuk memilih Parlemen diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi masyarakat dan 48 dari perorangan, hasil akhir Pemilu Parlemen dimenangkan oleh PNI dengan perolehan 8.434.653 suara dan 57 kursi di Parlemen. Pemilu untuk memilih Konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi masyarakat dan 29 dari perorangan, Pemilu Konstituante dimenangkan PNI dengan perolehan 9.070.218 suara dan 119 kursi di Konstituante.

Setelah dilakukan negosiasi yang panjang, pada akhirnya Indonesia menganut sistem demokrasi Liberal yang disebut juga dengan demokrasi Parlementer karena pemerintah di bawah kekuasaan Parlemen. Dalam sistem demokrasi Parlementer, susunan menteri Kabinet diangkat dan diberhentikan oleh Parlemen sedangkan kedudukan seorang Presiden hanya sebagai simbol negara. Di samping itu, hubungan Presiden Soekarno dengan Parlemen tidak pernah menemukan kesepakatan dalam konsep penyusunan konstitusi dan kenegaraan. Atas dasar inilah kemudian Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli tahun 1959 melalui keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembalinya Kepada UUD 1945 dengan diproklamirkan sistem demokrasi Terpimpin.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959 kedudukan Soekarno semakin menguat sebagai Presiden ditambah lagi Pada tahun 1963 melalui Tap MPR Nomor III mengeluarkan ketetapan dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Pada tahun 1959 Soekarno mengangkat Perdana Menteri sendiri, membuat Kabinet dan mengangkat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR). Dengan kekuasaannya yang tidak terbatas, kekuasaan yudikatif juga dapat dikendalikan dengan dirumuskannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kedua Undang-undang kehakiman ini membolehkan Presiden mengintervensi pelaksanaan peradilan dari tingkat bawah sampai di tingkat Mahkamah Agung. Pada masa kekuasaan demokrasi Terpimpin, Indonesia mengalami krisis di bidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan, sehingga Presiden Soekarno dipaksa untuk menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 dan diberhentikan dalam Sidang Istimewa MPR kemudian digantikan kedudukannya oleh Presiden Soeharto.

Dalam Sistem Pemilu Orde Baru, Pada tahun 1966 sistem demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dengan berakhirnya Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi Terpimpin dan lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan demokrasi Pancasila. Pada masa Orde Baru ditandai dengan penempatan negara sebagai aktor tunggal, sebagaimana telah disahkan secara tegas dengan seluruh birokrasi dan militernya demi kepentingan pembangunan dan politik. Di sinilah terjadi pergeseran model demokrasi diganti dengan sistem feodalisme yang bertujuan untuk meyatukan birokrasi negara dan militer dalam satu komando serta menyingkirkan partai massa yang dianggap membahayakan stabilitas kekuasaannya. Presiden Soeharto berkuasa kurang lebih 32 tahun, selama berkuasa Soeharto mendominasi kekuasaan legislatif dan yudikatif dengan menunjukkan cara kepemimpinannya yang otoriter dan melanggar hak asasi manusia.

Pemilu pertama masa Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1971 dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) atas dasar Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu 1971 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat.

Sistem penghitungan penetapan anggota Parlemen berdasarkan stelsel daftar atau pembagian total suara dari masing-masing wilayah dibagi dengan electoral quotient. Dalam pemilu 1971 ada 460 kursi Parlemen yang diperebutkan, dengan rincian 360 dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat sedangkan yang 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional oleh Presiden. Hasil akhir Pemilu dimenangkan Golkar dengan perolehan 34.348.673 suara dan 236 kursi di Parlemen.

Pada Pemilu pertama Golkar sebagai golongan karya menjadi salah satu peserta Pemilu dengan perolehan suara yang signifikan dan mampu mengalahkan pesaingnya, hasil perolehan suara dalam Pemilu 1971 menunjukkan Golkar pada peringkat pertama. Hal ini yang menjadi alat Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya dengan menggunakan strategi tiga jalur untuk memobilisasi massa. Pertama, jalur ABRI ditempuh dengan peran ganda ABRI, yaitu pertahanan keamanan dan sosial-politik. Kedua, jalur Birokrasi ditempuh dengan monoloyalitas PNS, pemerintah membuat aturan bahwa PNS harus menyalurkan politiknya di Sekber Golkar. Ketiga, jalur Golkar yang ditempuh dengan isu pembangunan nasional.

Sistem Pemilu yang digunakan adalah proporsional dengan daftar calon tertutup dan diikuti 2 partai politik dan 1 Golkar yang bertarung untuk memilih anggota DPR, DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi. Sistem penghitungannya dengan stelsel daftar atau pembagian total suara dari masing-masing wilayah dibagi dengan electoral quotient. Pemilu 1977 ada 460 kursi Parlemen yang diperebutkan, dengan rincian 360 dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat dan 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional. oleh Presiden. Hasil akhir Pemilu 1977 dimenangkan Golkar dengan perolehan 39.750.096 suara dan 232 kursi di Parlemen.

Untuk mengokohkan kekuasaannya pemerintah Orde Baru memberlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang mewajibkan organisasi masyarakat dan partai politik harus berasas tunggal yaitu asas Pancasila. Hal ini berdampak pada PPP, di mana PPP harus mengganti asasnya dari Islam menjadi asas Pancasila dan dari lambang ka'bah menjadi lambang bintang. Pemilu menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti dua partai politik dan 1 Golkar. Perolehan kursi Parlemen berdasarkan dengan stelsel

daftar atau pembagian total suara dari masing-masing wilayah dibagi dengan electoral quotient. Hasil akhir Pemilu tahun 1997 dimenangkan Golkar dengan perolehan 84.187.907 suara dan 325 kursi di Parlemen.<sup>29</sup> Pemilihan Umum masa Orde Baru sejak tahun 1971 sampai 1997 hanya memilih anggota Parlemen, sementara Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh MPR. Setelah Pemilu 1997 dan Soeharto menjadi Presiden kembali, gerakan oposisi mulai menguat dengan lahirnya gerakan mahasiswa dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu penyebab gerakan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan secara besar-besaran yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah, sehingga membuat Soeharto lemah dan berhenti dari jabatannya pada tahun 1998.

Pasca Orde Baru beralih ke Masa Reformasi, Sistem Pemilu Masa Reformasi ini ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada BJ. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa Reformasi menjadi babak baru untuk menghidupkan kembali demokrasi yang telah lama terdominasi oleh sistem politik central. Pada masa Reformasi demokrasi mulai bersemi dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai dengan perombakan sistem hukum Indonesia, termasuk membentuk Undang-undang Pemilu, partai politik dan dudukan Parlemen. Hal ini didukung dengan disahkannya Undang-undxxang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR, MPR dan DPRD. UUD 1945 juga ikut diamandemen sampai 4 kali perubahan pasca Pemilu tahun 1999, tujuan amandemen ini adalah untuk memperjelas norma hukum yang berkaitan dengan HAM dan mengatur secara rinci hak warga negara sebagai bentuk kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Pemilu pertama masa Reformasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dengan asas demokratis, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil (Luber dan Jurdil). Pelaksanaan pemilihan anggota legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 48 partai politik dengan penghitungan suara terbanyak dari setiap daerah tingkat II dan mendapatkan minimal 1 kursi di DPR RI sebagai bentuk keterwakilan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu menyebutkan: "Jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan pada jumlah penduduk di setiap daerah tingkat I dengan ketentuan setiap daerah tingkat II mendapat jatah kursi di DPR RI minimal 1 (satu)".

Pemilihan Presiden dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1999 melalui sidang MPR dan menunjuk Abdurrahman Wahid sebagai Presiden yang didukung Poros Tengah dengan perolehan 373 suara dan Megawati memperoleh 313 suara. Pada akhir tahun 2000 para elit politik merasa kecewa dengan sikap politik Abdurrahman Wahid, sehingga pada tanggal 23 Juli tahun 2001 MPR menggelar Sidang Istimewa untuk memberhentikan Abdurrahman Wahid dan menunjuk Megawati Soekarno Puteri menjadi Presiden Republik Indonesia.

Pemilu 2004 adalah upaya pemerintah mewujudkan sistem Presidensial, di mana rakyat dapat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Namun, dalam pelaksanaannya Pemilu 2004 banyak terjadi pelanggaran, baik dari money politics, intimidasi, teror politik maupun manipulasi penghitungan suara, hal ini ditandai dengan terjadinya penolakan pengesahan dari beberapa partai terhadap hasil pemungutan suara Pemilu legislatif tahun 2004 karena dianggap terdapat kecurangan.<sup>75</sup> Pemilu ketiga masa Reformasi dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif dan eksekutif. Pemilihan legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil (Luber dan Jurdil). Pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, Parliamentary Threshold sebesar 2,5% dengan metode penghitungan menggunakan sistem suara terbanyak dan jatah kursi untuk setiap daerah adalah 3-10. Hasil akhir Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dimenangkan pasangan SBY-Boediono dengan perolehan 73.847.562 atau 60.80% suara.<sup>39</sup> Pemilu 2009 sebagai proses konsolidasi demokrasi yang hanya mewujudkan “demokrasi substansial” untuk mempercepat terbentuknya “demokrasi yang terkonsolidasi”. Artinya Pemilu 2009 yang diselenggarakan secara langsung ini hanya menjalankan demokrasi sebatas formalitas demi mencapai kekuasaan.

Pemilu keempat masa Reformasi dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif dan eksekutif. Pemilihan legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan, untuk dapat menjadi peserta Pemilu mensyaratkan keterlibatan 30% perwakilan perempuan sebagai pengurus partai di tingkat

pusat.<sup>78</sup> Pemilu 2014 diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka Pemilu dilaksanakan hanya satu putaran karena telah memenuhi syarat 50% suara. Hasil akhir Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dimenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan perolehan 70.997.833 suara atau 53,15%.<sup>79</sup> Pemilu kelima masa Reformasi merupakan Pemilu serentak pertama yang dilaksanakan untuk memilih legislatif dan eksekutif dalam waktu bersamaan. Pemilu 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta KPU sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip nasional, tetap dan mandiri.

Pelaksanaan Pemilu 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Hasil Judicial Review Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peserta Pemilu 2019 diikuti 14 partai politik dan hanya 9 partai yang mendapatkan kursi di Parlemen. Hasil akhir pemilihan legislatif dimenangkan oleh PDI Perjuangan dengan perolehan 27.053.961 suara dan mendapatkan 128 kursi di Parlemen<sup>47</sup> dan hasil akhir pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimenangkan pasangan Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin dengan perolehan 85.607.362 suara atau 55,50%.

Pemlu 2024 memberikan warna yang berbeda di banding pemilu sebelumnya, Pemilu yang di gelar 14 April 2024 tersebut serta Pilkada serentak tersebut melahirkan dinamika yang mendapatkan banyak penilain. Sebagaimana diketahui, pemilu serentak dan pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Di mana dalam satu tahun, masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dengan begitu banyak calon pejabat publik.

Pemilu 2024 tetap menggunakan UU Pemilu yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu 2019, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghadapi tantangan, kerumitan yang sama dengan yang dihadapi dalam Pemilu 2019. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa model pemilu serentak yang diterapkan pada Pemilu 2019, juga akan berlaku untuk Pemilu 2024. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus mempersiapkan secara baik dan matang. Jadwal dan tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan dan hari pemungutan

suara jatuh pada 14 Februari 2024. Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, pasangan Prabowo-Gibran dinyatakan memperoleh 96.214.691 suara. Sementara itu, pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengantongi 40.971.906 suara. Selanjutnya, pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, meraup 27.040.878 suara. Pasangan Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar: 40.971.906 suara (24,95%), Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 96.214.691 suara (58,58%) Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 27.040.878 suara (16,47%) Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut, pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangi kontestasi Pilpres 2024 atas pasangan calon lainnya dengan selisih suara yang terpaut jauh.

Sementara, pada pemilu legislatif (pileg), PDI Perjuangan juara dengan perolehan 25.387.279 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil). Di urutan kedua, ada Partai Golkar dengan perolehan 23.208.654 suara. Sementara itu, Partai Gerindra ada di posisi ketiga dengan perolehan 20.071.708 suara. Melengkapi posisi empat besar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengantongi 16.115.655 suara. Lalu, di urutan kelima ada Partai Nasdem dengan perolehan 14.660.516 suara.

Tentu pada prinsipnya, manusia yang disebut dengan hewan yang berpolitik tentu memiliki keberagaman cara dalam mencapai kepentingan yang biasa kita sebut Strategi. Dalam konteks politik, Strategi diartikan sebagai apa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam pemilihan umum dan pilpres, sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap aktor yang bertarung dalam suatu pemilihan tentu memiliki strategi dan modal tertentu untuk mencapai keinginannya. Pada pemilihan umum Kabupaten Kolaka, terdapat ratusan aktor untuk memperebutkan 30 Kursi di DPRD Kabupaten Kolaka. Salah satu aktor

yang menjadi peserta kontestasi pemilu di Kabupaten Kolaka yang cukup menarik yakni Agil Siradj Ahmad. Agil Siradj Ahmad lahir pada tanggal 12 Desember 2001, Ia merupakan anak bungsu dari Mantan Bupati Kolaka 2 periode yakni Ahmad Sjafei. Ia menempuh karir pendidikan dasar mulai Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Kolaka dan terakhir di tahun 2024 melulusi jenjang S1 nya di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Kota Makassar. Saat ini, beliau bergelut dalam dunia Kewirausahaan/Pengusaha di berbagai sektor. Beliau juga merupakan Ketua Banteng Muda Indonesia Kabupaten Kolaka dan Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten Kolaka. Di tengah dinamika politik dan kebutuhan akan pembaruan di Kolaka, Agil Siradj Ahmad muncul sebagai salah satu kandidat yang mencuri perhatian. Mengusung semangat perubahan dan pembangunan, Agil menawarkan visi yang segar untuk masa depan wilayah ini.

Sebagai seorang caleg, Agil Siradj Ahmad dikenal dengan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kolaka. Latar belakangnya yang kuat dalam berbagai bidang, baik itu dalam pendidikan, ekonomi, maupun sosial, membentuk pandangan dan rencananya untuk daerah ini. Agil membawa pendekatan yang berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, berfokus pada solusi praktis yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga Kolaka. Agil Siradj Ahmad juga dikenal sebagai sosok yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kepedulianya terhadap isu-isu lokal, seperti Olahraga, pendidikan, dan kesehatan, mencerminkan keinginannya untuk benar-benar memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Dengan gaya kepemimpinan yang visioner, Agil Siradj Ahmad berusaha untuk menjadi agen perubahan yang efektif. Dia percaya bahwa setiap langkah kecil menuju perbaikan dapat membawa dampak besar bagi kesejahteraan bersama. Dalam pemilihan 2024, Agil tidak hanya menawarkan dirinya sebagai calon legislatif, tetapi juga sebagai mitra strategis untuk mewujudkan aspirasi dan harapan masyarakat Kolaka.

Kemudian dengan modal dan kesiapan Agil Siradj Ahmad memberanikan bertarung dalam Pemilihan Calon Legislatif Dapil 1 Kabupaten Kolaka yang melingkupi wilayah Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Latambaga melalui Partai Indonesia Perjuangan – Indonesia (PDIP). Pilcaleg 2024 kemarin Agil Siradj Ahmad mampu menjadi jawara menduduki kursi pertama dengan perolehan suara individu sebanyak 3493 dan suara partai sebanyak 6944. Pemuda 22 tahun tersebut mampu menjadi pemenang baru dan pendatang baru dalam pemilu DPRD

Kabupaten kolaka. Aktivitas kepemudaan Agil Siradj Ahmad sudah dilakoni sejak di bangku SMA. Kegiatan pengembangan dalam olahraga futsal merupakan salah satu modal beliau mendapat simpati dan dorongan terhadap masyarakat khususnya pemuda di kabupaten kolaka.

Kabupaten Kolaka adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten Kolaka berada di kecamatan Kolaka. Kabupaten Kolaka (induk) telah dua kali mengalami pemekaran, yakni Kabupaten Kolaka Utara, dan yang terbaru adalah Kabupaten Kolaka Timur yang telah disahkan pada akhir tahun 2012. Pasca pemekaran, kabupaten Kolaka mencakup daratan dan kepulauan yang memiliki wilayah seluas 3.283,59 Km<sup>2</sup>, dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas ± 15.000 Km<sup>2</sup>.

Kolaka merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, yang dimana kota kolaka sebagai ibukonya. Kabupaten kolaka mengalami dua kali pemekaran, yakni kabupaten kolaka utara dan kabupaten kolaka timur. Dengan jumlah penduduk 256.827 jiwa di tahun 2018 yang tersebar di 186 kelurahan/ desa di 12 kecamatan yang mayoritas masyarakatnya merupakan petani. Penerimaan pemasukan pendapatan daerah kabupaten kolaka bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah perekonomian terutama kemiskinan di kabupaten kolaka, hal ini terlihat dari jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2016 sebanyak 28.860 jiwa yang sebelumnya pada tahun 2013 sebanyak 56.346 jiwa. Dan pada tahun 2019 jumlah masyarakat miskin di kabupaten kolaka mencapai 24.000 jiwa. Dari sini kita ketahui bahwa jumlah kemiskinan di setiap tahunnya mengalami penurunan.

Kolaka dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, termasuk hasil pertanian, perikanan, dan mineral. Daerah ini juga memiliki keindahan alam yang memukau, seperti pantai-pantai yang indah dan hutan tropis yang lebat. Kolaka memiliki potensi ekonomi yang besar terutama dalam sektor pertambangan, pertanian, dan pariwisata. Selain itu, Kabupaten Kolaka juga dikenal karena keberagaman budaya dan adat istiadatnya yang melengkapi kekayaan daerah ini. Dengan berbagai upaya pembangunan dan pengembangan yang terus dilakukan, Kolaka berpotensi menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat di Sulawesi Tenggara. Masyarakat setempat yang terdiri dari berbagai etnis dan suku juga turut serta dalam menjaga kearifan lokal sambil beradaptasi dengan

perubahan zaman, menjadikan Kolaka sebuah kawasan yang dinamis dan penuh peluang.

Dalam pemilihan umum DPRD Kolaka 2024 yang lalu, Peta sebaran dapil di kelompokkan menjadi 4 dapil dan memperebutkan 30 Kursi. Berikut pembagiannya :

No	Dapil	Kecamatan	Perolehan kursi
1	I	Kolaka, Latambaga	9
2	II	Wundulako, Pomala, baula	8
3	III	Watubangga, Tanggetada, Toari, Polinggona	6
4	IV	Wolo, Samaturu, Iwoimenda	7

Keberhasilan Agil Siradj Ahmad semakin menguatkan dugaan bahwa modal politik sangat berperan penting dalam keberhasilan mempertahankan kemenangan dalam pemilihan legislatif 2024 kabupaten Kolaka . Hal inilah sebagai fenomena politik yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam, selain melacak proses politik selama pelaksanaan pemilu, uraian mengenai modal politik Agil Siradj Ahmad sebagai salah satu jawara sekaligus pendatang baru dalam pemilihan legislatif diperlukan untuk mengetahui modal politik dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan yang paling efektif dalam kontestasi politik di ranah lokal. Oleh Karena itu maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul: **“MODAL POLITIK AGIL SIRADJ AHMAD CALEG DAPIL 1 KABUPATEN KOLAKA DALAM PEMILU 2024.”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, peneliti merumuskan pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah Bagaimana Agil Siradj Ahmad membentuk modal (modal) sehingga memberanikan maju dalam kontestasi Pemilu di Dapil 1 Kabupaten Kolaka ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kapital-kapital tersebut mempengaruhi keberanian dan kesiapan Agil dalam menghadapi pemilihan. Selain itu, studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi calon legislatif lainnya serta menyumbangkan pemahaman baru dalam literatur politik dan kampanye, khususnya dalam konteks politik lokal dan regional.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan strategi yang diterapkan oleh Agil tetapi juga memberikan panduan dan pembelajaran bagi praktisi politik dan peneliti di bidangnya.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Akademis

- a. Menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang, yang terkait strategi yang dilakukan politisi untuk memenangkan pemilihan umum
- b. Memperkaya kajian ilmu politik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang politik yang mengkaji strategi pemenangan

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).
- b. **Informasi Praktis bagi Praktisi Politik:** Bagi praktisi politik dan konsultan kampanye, penelitian ini menawarkan informasi praktis tentang bagaimana membangun dukungan politik dan memanager sumber daya untuk mencapai tujuan politik. Temuan penelitian dapat digunakan untuk merancang strategi kampanye yang lebih efektif.
- c. **Pemahaman Mendalam tentang Pembentukan Kapital:** Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana seorang calon legislatif membentuk kapital sosial, politik, ekonomi, & simbolik, untuk mempersiapkan dan menjalankan kampanye. Ini membantu dalam memahami mekanisme yang digunakan untuk memperoleh dukungan dan keberanian dalam kontestasi pemilu.

- d. **Peningkatan Kesadaran Publik:** Dengan menyajikan bagaimana calon legislatif membangun kapital, penelitian ini juga meningkatkan kesadaran publik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kontestasi pemilu, sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang lebih informasi tentang calon yang mereka pilih.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya. Peneliti juga akan mengemukakan dan menunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti berbeda dan belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga akan terlihat bahwa posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu. Kemudian dalam bab ini juga akan membahas tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan peneliti jawab melalui penelitian ini.

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah suatu acuan peneliti untuk membandingkan peneliti dengan hasil peneliti yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, Penelitian terdahulu menjelaskan tentang beberapa hasil penelitian sebelumnya namun memiliki kesamaan dengan tema dibahas oleh peneliti. Berikut merupakan penelitian-penelitian yang terkait dengan judul penulis yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anggun Paradina dengan judul penelitian “Strategi Aktor Politik Milenial Pada Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Pinrang Tahun 2019”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana strategi politik yang digunakan A. Aan Nugraha dalam memenangkan pemilihan legislatif di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019. Penulis juga melakukan penelitian studi kasus dengan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap dapat menjawab apa yang mempengaruhi kemenangan A. Aan Nugraha pada pemilihan legislatif di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019. Adapun pendekatan dan teori yang digunakan yaitu meminjam teori dari Pierre Bourdieu yakni Habitus, Modal dan Ranah.

Dalam hasil penelitian, telah ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kemenangan A. Aan Nugraha dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019. Latar belakang keluarga A. Aan Nugraha telah membuat masyarakat desa Kaliang dibantu oleh pemuda desa mempengaruhi masyarakat untuk menyeragamkan pilihannya pada hari pemilihan dan mempercayai sepenuhnya A. Aan Nugraha untuk duduk di kursi DPRD Kabupaten Pinrang. Ditambah partai yang

menndukung penuh dan mendahulukan A. Aan Nugraha untuk memenangkan pemilihan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Fadel Miftahuddin Pababari dengan judul “Eksistensi H. Almalik Pababari Sebagai Aktor Politik”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi H. Almalik Pababari sebagai aktor politik di Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh 4 (empat) faktor. Pertama, latar belakang keluarga H. Almalik Pababari. Kedua, pengalaman sebagai Bupati Mamuju periode 1999-2004. Ketiga, memiliki rekam jejak sebagai salah satu pejuang pemekaran Provinsi Sulawesi Barat. Keempat, pengalaman sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat periode 2004-2019. Sementara itu, terdapat 4 (empat) upaya H. Almalik Pababari dalam membangun ketokohan politik. Pertama, menjaga silaturahmi dengan masyarakat. Kedua, mempertahankan gaya orasi di depan publik. Ketiga, bekerja dengan profesional dan peduli. Keempat, berusaha merangkul lawan politik

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Septiana Putri Rahayanti dengan judul “Strategi Komunikasi Politik Pada Fitron Nur Ikhsan (Anggota DPRD Provinsi Banten 2 Periode), Tahun 2020”. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Fitron Nur Ikhsan adalah menggunakan beberapa strategi, yaitu melakukan perencanaan komunikasi politik, menggunakan komunikasi door to door, menggunakan komunikasi persuasif, merealisasi program kerja dan menggunakan komunikasi pencitraan. Faktor pendukung yang mempengaruhi adalah adanya tim, atribut partai, media yang menunjang sosialisasi dan sebagainya. Adapun hambatannya adalah jarak wilayah di sekitar perbatasan yang luas dan tidak memungkinkan untuk dijangkau, jaringan tim yang sulit untuk memperoleh suara dan keterbatasan dana saat melakukan sosialisasi, dana yang belum memadai, merelakan fisik untuk mau lelah dan rela bagi waktu antara masyarakat dan keluarga. Ini semua dilakukan untuk memperoleh dukungan suara yang maksimal dari masyarakat sehingga bisa terpilih kembali menjadi anggota DPRD berturut-turut 2 periode.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Darwin dengan judul “Strategi Danny Pomanto Dalam Upaya Mencalonkan Diri Sebagai Walikota Makassar Pada Pilkada 2020”. Hasil penelitian menunjukan bahwa Strategi politik danny pomanto merupakan pola strategi defensif, dimana menjaga dan memperkokoh solidaritas basis massanya sehingga menjadi citra yang baik bagi danny pomanto. citra inilah

membuat popularitas serta elektabilitasnya terus memuncak. Pada saat yang sama berkat popularitas dan elektabilitasnya yang cukup tinggi, menjadi daya tarik sendiri dari danny pomanto terhadap partai politik. Hal ini kemudian dilihat dari partai Nasdem dan partai gerindra memberikan surat rekomendasinya kepada danny pomanto yang dijadikan sebagai kendaraan untuk menjadi calon walikota makassar pada Pilkada 2020. Diluar dari popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi, tentunya terjadi kesepakatan politik antara danny pomanto dan partai Nasdem serta Gerindra yang saling menguntungkan untuk menyambut agenda atau momentum pertarungan politik selanjutnya.

Keempat penelitian tersebut memiliki relevansi atau persamaan yang terkait dengan penelitian ini yakni secara umum menjelaskan terkait strategi- strategi pemenangan politik dan membangun citra maupun ketokohan dalam ranah politik yang digunakan pada masing-masing aktor dalam memenangkan pertarungan politik di berbagai tingkatan serta menggunakan metode penelitian kualitatif.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian yang dipilih yaitu Agil Siradj Ahmad dalam Pemilihan calon legislatif di dapil I Kabupaten Kolaka yang berasal dari partai PDIP. Selain itu, dari seluruh caleg Dapil 1 Kolaka, Agil Siradj Ahmad merupakan salah satu pendaatng baru dan merupakan caleg termuda yang terpilih dalam perjalanan sejak Pemilu DPRD Kabupaten Kolaka berlangsung, Agil Siradj Ahmad Saat ini masih menginjak usia 23 tahun dan berhasil menduduki kursi pertama dalam Pemilu Caleg DPRD KOLAKA Dapil I. Kekuatan modal lah yang memberikan kemenangan telak atas prosesnya. Sehingga Agil Siradj Ahmad bisa membentuk sejarah baru dalam perhelatan kontestasi Pemilu di kabupaten Kolaka.

## **2.2. Kerangka Teori**

Pada penelitian ini, penulis ingin menggunakan dan meminjam tinjauan pemikiran Pierre Bourdieu dalam melihat realitas sosial dan politik, selanjutnya akan di urai alat analisis dari pemikiran Pierre Bourdieu. Alat analisis bordieu bisa kita temukan dalam gagasan pokok mengenai teori habitus, modal dan arena.

Sederhananya, Bourdieu memahami realitas sosial sebagai relasi dialektika antara individu (agen, struktur subjektif) dengan struktur objektif yakni struktur itu sendiri. relasi dialektika ini melibatkan unsur-unsur

subjektif seperti mental individual, struktur pengalaman individual, struktur kognitif, dsb yang berdialektika dengan struktur objektif. Dialektika ini menghasilkan “praktik”. Dan dalam relasi dialektika ini, Bourdieu memunculkan konsep-konsep untuk menjelaskan “struktur subjektif” dan “objektif” tersebut yakni yang disebutnya sebagai “*habitus*” dan arena (ranah, field). Habitus mengacu pada “apa yang ada dan dimiliki oleh agen (individu). Pertemuan habitus dalam arena memunculkan modal (kapital), yang dapat merupakan kapital sosial, ekonomi, kultural dan simbolik. Habitus, arena, kapital menghasilkan apa yang disebut Bourdieu sebagai kuasa simbolik. Berikut penjelasan dan relasi di antara habitus, arena, kapital dan kuasa.

### **2. 2.1. Habitus**

Dalam penjelasannya tentang ilmu sosial, Bourdieu menaruh perhatian pada apa yang dilakukan individu dalam kehidupan sehari – hari mereka. Dia berpendapat bahwa kehidupan sosial tidak dapat di pahami semata – mata sebagai agregat perilaku individu. Dia juga tidak menerima bahwa praksis dapat di pahami secara terpisah dalam hal pengambilan keputusan individu, di satu sisi atau sebagai sesuatu yang ditentukan oleh struktur supra individual, sebagaimana dilakukan metafisika objektivisme, di sisi yang lain.

Dalam menjelaskan kata habitus, Bourdieu menjabarkan pertama kali pada tahun 1967 dalam suatu penjelasan dimana dia menulis pengantar pada edisi terjemahannya sendiri ke dalam bahasa Prancis pada tulisan Panofsky, Gothic Architecture and Scholasticism, ia menerangkan bahwa suatu sistem skema generatif yang didapatkan dan disesuaikan secara objektif dengan kondisi khas dimana dia dibangun (lingkungan).

Penjelasan tentang habitus menemukan ekspresi lain dalam pemakaian kata “hexis” oleh Bourdieu. Berasal dari bahasa Yunani, yang maknanya tidak berbeda dengan kata lain “habitus” dalam karya Bourdieu kata ini digunakan untuk menjelaskan sikap, cara, dan gaya dimana aktor membawakan dirinya sendiri, sikap, bahasa tubuh, cara berjalan dll. Kemiripan makna asli kedua kata tersebut, habitus dan hexis, merupakan indikasi sentralitas konseptualisasi Bourdieu atas Habitus dalam hexis ragawi (mitologi politis ex: cara berbicara, cara berdiri), hal – hal yang bersifat khusus (personal) menyatu dengan yang sistematis (yang sosial).

Habitus merupakan “struktur-struktur yang dibentuk” dan “struktur-struktur yang membentuk”. Disatu sisi, habitus berperan sebagai sebuah struktur yang membentuk kehidupan sosial. Sedangkan disisi lain, habitus dipandang sebagai struktur yang dibentuk oleh kehidupan sosial. Dalam

proses ini, struktur-struktur yang dibentuk menjelma menjadi struktur-struktur yang membentuk.

Maka Bourdieu melihat habitus sebagai kunci bagi reproduksi sosial karena ia bersifat sentral dalam membangkitkan dan mengatur praktik-praktik yang membentuk kehidupan sosial. Individu-individu belajar untuk mendambakan hal-hal yang dimungkinkan bagi mereka, dan tidak mengaspirasi hal-hal yang tidak tersedia bagi mereka. Kondisi-kondisi di mana individu hidup membangkitkan disposisi-disposisi (kecondongan) yang cocok dengan kondisi-kondisi tersebut (termasuk selera pada seni, sastra, makanan, dan musik), dan dalam arti tertentu mem-*pra*-adaptasi terhadap tuntutan-tuntutan dari kondisi tersebut. Praktik-praktik yang paling tidak dimungkinkan dengan demikian disisihkan, sebagai hal-hal yang tak terbayangkan, lewat semacam ketundukan segera terhadap tatanan tertentu. Tatanan tersebut membuat agen-agen condong untuk mengerjakan sesuatu dengan suka hati, yaitu untuk menolak apa yang secara kategoris memang tertolak, dan untuk menghendaki hal-hal yang memang tak terhindarkan.

Habitus, adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dan realitas sosial. Individu menggunakan habitus dalam berurusan dengan realitas sosial. Habitus merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial. Struktur kognitif memberi kerangka tindakan kepada individu dalam hidup keseharian bersama orang-orang lain. Habitus merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas bermain, dan juga pendidikan masyarakat dalam arti luas. Dalam interaksi dengan orang lain atau pihak luar ini, terbentuklah ranah (*arena*), yang merupakan jaringan relasi posisi-posisi objektif. Habitus juga mencakup pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang dunia, yang memberikan kontribusi tersendiri pada realita dunia itu. Oleh karenanya, pengetahuan memiliki kekuasaan konstitutif atau kemampuan menciptakan bentuk realitas dunia

. Habitus adalah disposisi yang diperoleh melalui proses sosialisasi dan mempengaruhi cara individu berperilaku dan berpikir. Habitus juga mempengaruhi preferensi budaya seseorang. Bourdieu berargumen bahwa selera budaya tidak hanya bersifat individual tetapi juga kolektif, dibentuk oleh latar belakang modal. Melalui habitus, individu secara tidak sadar mengadopsi preferensi budaya yang sesuai dengan kelas sosial mereka, yang pada gilirannya memperkuat batasan-batasan sosial.

Dengan demikian, Habitus merupakan konstruksi pengantar,

bukan konstruksi penentu. Maka menurut Bourdieu, aktor juga mengombinasikan antara habitus, modal dan Arena. Modal dalam teori Bourdieu terbagi atas empat yaitu modal ekonomi, modal kebudayaan, modal sosial dan modal simbolik. Modal ekonomi yang dimaksud adalah berapa banyak modal finansial yang dimiliki sang aktor.

Dalam konteks politik, konsep habitus dapat digunakan untuk memahami praktik politik Agil Siradj Ahmad, seorang aktor politik yang aktif dalam kancah perpolitikan. Habitus Agil Siradj Ahmad dibentuk oleh latar belakang sosial, pendidikan, dan pengalaman politiknya yang dilaluinya. Sebagai seorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang kental dengan budaya politik dan kepemudaan, Agil Siradj Ahmad menginternalisasi nilai-nilai kepedulian terhadap masyarakat khususnya kepemudaan dan dunia olahraga. Disposisi ini mempengaruhi cara dia berpikir, bertindak, dan merespons berbagai isu politik dan sosial yang dihadapi.

Praktik politik Agil Siradj Ahmad mencerminkan habitus yang telah terbentuk tersebut. Dalam setiap keputusan dan tindakannya, terlihat adanya kecenderungan untuk mengedepankan potensi kepemudaan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, ketika Agil Siradj Ahmad mulai merintis klub futsal Alvaro Futsal Club serta mengembangkan potensi – potensi pemuda kabupaten Kolaka yang Agil Siradj Ahmad secara intens untuk di persiapkan dan mengikut sertakan dalam perlombaan kancah lokal maupun nasional dan kepedulian sosial Agil Siradj Ahmad dilihat dalam beberapa momen seperti beliau membuat agenda sunatan, pembagian sembako dan beberapa agenda sosial lainnya yang terkadang di hasilkan dari keikutsertaannya dalam perjalanan politik Ahmad Sjafei (Mantan Bupati Kolaka) yang merupakan ayahanda dari Agil Siradj Ahmad, Agil tidak hanya bertindak berdasarkan strategi politik semata, tetapi juga didorong oleh disposisi internal yang telah terinternalisasi sejak lama. Hal ini menunjukkan bagaimana habitus yang dibentuk oleh pengalaman dan latar belakang sosial dapat mempengaruhi dan membimbing tindakan politik seorang individu.

### **2.2.2. Arena**

Arena adalah ruang khusus yang ada di dalam masyarakat. Ada beragam arena, seperti arena pendidikan, arena bisnis, arena seniman, dan arena politik. Jika orang ingin berhasil di suatu arena, maka ia perlu untuk mempunyai habitus dan modal yang tepat. Arena menurut Bourdieu, adalah suatu arena sosial yang di dalamnya perjuangan atau manuver terjadi untuk memperbutkan sumber atau pertarungan dan akses terbatas. Arena di definisikan sebagai taruhan yang dipertaruhkan benda kultural

(gaya hidup), perumahan, kemajuan intelektual (pendidikan), pekerjaan , tanah, kekuasaan (politik), kelas sosial, prestise atau lain- nya dan mungkin berada pada tingkatan yang berbeda dengan spesifikasi dan derajat kekonkretan.

Konsep "arena" atau "field" yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu adalah alat analitis penting untuk memahami dinamika kekuasaan dan interaksi sosial dalam berbagai konteks. Arena merujuk pada ruang sosial spesifik di mana individu dan kelompok berkompetisi untuk memperoleh posisi, kekuasaan, dan pengaruh. Setiap arena memiliki aturan, struktur, dan bentuk modal yang unik, yang menentukan bagaimana agen-agen berinteraksi dan berjuang di dalamnya. Untuk bisa berhasil dalam salah satu arena dalam hidup, orang perlu mempunyai habitus dan modal yang tepat untuk arena itu. Jika ia tidak memiliki habitus dan kapital yang tepat untuk satu arena, maka ia, kemungkinan besar, akan gagal dalam arena yang telah ia pilih tersebut.

Arena tidak terisolasi satu sama lain; mereka saling berinteraksi dan mempengaruhi. Misalnya, keberhasilan dalam arena ekonomi dapat memberikan modal yang berharga dalam arena politik. Sebaliknya, pengaruh simbolik dapat membantu seseorang memperoleh keuntungan dalam arena ekonomi.

Dengan demikian, konsep arena Bourdieu membantu kita memahami bagaimana kekuasaan dan posisi sosial dimainkan dan diperebutkan dalam berbagai konteks sosial. Ini memberikan kerangka analitis untuk mengeksplorasi dinamika kompleks interaksi sosial dan bagaimana struktur sosial direproduksi dan diubah. Dengan memahami konsep arena, kita dapat lebih baik mengeksplorasi bagaimana kekuasaan, status, dan sumber daya sosial diperebutkan dan diperoleh dalam berbagai konteks sosial. Konsep ini membantu menjelaskan bagaimana struktur sosial direproduksi dan diubah melalui interaksi dan kompetisi di berbagai arena kehidupan sosial.

Dalam kehidupan sosial, perlu adanya pemahaman terhadap interaksi di antara manusia, begitu pun dalam menerangkan kejadian atau fenomena sosial, untuk melihat apa yang dikatakan atau yang tengah terjadi. Butuh memeriksa *ruang/ranah sosial (social space)*, tempat interaksi, transaksi, dan peristiwa berlangsung (Bourdieu dalam Patricia Thomson, 2005:148). Untuk pemahaman itu, analisis sosial dilakukan. Bukan hanya menempatkan objek investigasi pada sejarah tertentu dan konteks relasional atau lokal/nasional/internasional melainkan menginterogasi langkah-langkah pada pengetahuan mengenai obyek

(Hourdieu dalam Patricia Thomson, 1993a;1994d;2001c).

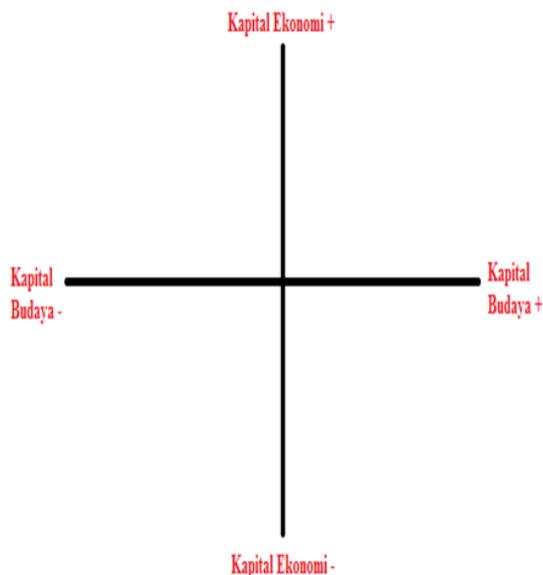
Arena (*field*) menurut Bourdieu merupakan *ruang sosial* -ruang kompetitif yang memuat beragam interaksi, transaksi, atau peristiwa. Apabila dianalogikan, arena seperti permainan (*game*) sepak bola karena memiliki aturan, sejarah, pemain unggulan, legenda, dan pengetahuan.

Di arena sosial, ada posisi-posisi agen sosial (manusia atau institusi), ada keterbatasan terhadap apa yang boleh/tidak, ada doksa (aturan-aturan yang tidak dipertanyakan lagi karena dianggap wajar). Dalam arena sosial pula, ada kompetisi seperti permainan sepak bola. Agen-agen sosial menggunakan ragam strategi guna memertahankan atau mengimprovisasi posisi mereka yang terhubung dengan habitus dan capital.

Capital yang dipertarungkan dalam arena sosial terdiri dari:

1. **Capital ekonomi**, bisa berupa uang - aset - harta.
2. **Capital budaya**, berupa ilmu, bahasa, suara.
3. **Capital sosial**, berupa keluarga, agama, warisan budaya, jaringan.
4. **Capital simbolik**.

Bourdieu mengemukakan bahwa capital ekonomi dan budaya beroperasi sebagai dua kutub yang hirarki dalam arena sosial seperti yang digambarkan pada gambar I.



### Gambar I. Diagram Arena pertarungan

Sumbu ekonomi vertikal dikarenakan capital ekonomi membawa lebih banyak status dan kekuatan kuasa dibandingkan capital budaya. Meski arena terhirarki, dengan adanya agen-agen sosial dan institusi yang dominan -memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang terjadi, tetapi masih ada agency dan perubahan. Tetap ada kemungkinan untuk bermain bebas di arena, bahwa peristiwa dalam arena yang berdampingan dan di luar arena (perubahan demografik, teknologi baru, krisis global, bencana alam, dan sebagainya) dapat melahirkan perubahan dalam arena. Arena merupakan permainan tanpa penemu dan lebih cair serta lebih kompleks dibandingkan permianan mana pun yang pernah didesain. (Bourdieu & Wacquant dalam Patricia Thomson, 1992a:104)

Dalam melakukan investigasi arena, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis posisi arena vis a vis arena kekuasaan.
2. Memetakan hubungan agen sosial/institusi yang berkompetisi.
3. Analisis habitus karena field dan habitus berkonstitusi secara dialektik, praktik tertentu memproduksi dan mereproduksi dunia sosial dan di waktu yang sama membuat mereka.

Arena berperan dalam kebudayaan (pelestarian dan perkembangan). Dalam kebudayaan -misalnya di sebuah tempat/arena tertentu, ada agen-agen sosial yang memiliki habitus dan capital budaya yang sama, diwariskan oleh leluhur dan dipatuhi tanpa dipertanyakan oleh generasi-generasi berikutnya, bereproduksi selama ada agen yang menggunakan. Apabila suatu saat kebudayaan itu dikomersilkan atau terkait dengan pariwisata yang notabene menyangkut urusan uang (ekonomi), maka akan terjadi persaingan antar agen-agen dengan capital budaya yang sama. Persaingan tersebut di satu sisi bisa menimbulkan pelestarian dan perkembangan, agen yang mungkin cuma menganggap capital budaya yang diwarisi hanya untuk tradisi mendadak jadi serius untuk memanfaatkan capital budaya tersebut. Di sisi lain, bisa terjadi perubahan agar terlihat lebih menarik untuk sektor pariwisata atau disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kaitan antara capital budaya, kebudayaan, dan kapitalisme ekonomi terlihat di kasus seperti itu. Menilik kembali pada diagram arena mengenai sumbu capital ekonomi dan budaya.

Apabila dipetakan, agen dengan capital budaya yang dikomersilkan akan mendapat keuntungan dari segi capital ekonomi. Ketika

dipertandingkan dalam arena sosial, meski dengan capital budaya yang sama, apabila capital ekonomi berbeda maka yang menang dalam arena tersebut adalah pemilik capital ekonomi yang tinggi karena memiliki capital ekonomi yang tinggi mendominasi/berkuasa dengan kekuatannya. Agen yang memiliki perekonomian di atas agen pesaing dianggap lebih sukses dan disegani.

Meski begitu, tidak ada pemenang absolut dalam arena. Kebudayaan yang dikomersilkan suatu hari bisa tidak laku lagi karena perubahan di dalam/luar arena. Bahkan mungkin saja, kebudayaan akan menghilang ketika masyarakat menganggap kebudayaan tersebut tidak relevan atau dibutuhkan. Dan yang tersisa, para pemilik capital budaya harus meningkatkan capital lain demi keberlangsungan hidup, supaya tidak ditindas oleh kekuasaan dalam arena. Akhirnya, dalam menganalisis kebudayaan dan masyarakat, konsep Arena (*field*) Bourdieu adalah konsep yang bisa digunakan karena kebudayaan sangat berkaitan dengan agen-agen sosial dan interaksi yang terjadi di antara agen tersebut.

Arena (*field*) dimaksudkan untuk menerjemahkan masalah praktik menjadi operasi empiris yang konkret. Untuk memahami interaksi di antara manusia, menerangkan kejadian atau fenomena sosial, dan untuk melihat apa yang dikatakan atau yang tengah terjadi.

Teori Bourdieu menyatakan bahwa (Habitus x Modal) + Arena = Praktik. Dalam penjabaran ini, kita dapat mengartikan bahwa habitus dan modal adalah satu benda yang tidak dapat dipisahkan dan kemudian berkumpul di tempat yang disebut arena atau Bourdieu. Seorang aktor yang memiliki sifat dan modal yang baik memiliki kemungkinan besar untuk menang dalam pemilihan di satu arena.

### **2.2.3. Modal**

Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Prancis terkemuka, memperkenalkan konsep modal sebagai alat untuk memahami dinamika kekuasaan dan stratifikasi sosial. Bourdieu memandang modal bukan hanya dalam pengertian ekonomi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk yang memainkan peran penting dalam struktur dan interaksi sosial. Menurut Bourdieu, modal dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk utama: modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik.

Modal Ekonomi merujuk pada sumber daya material yang dimiliki individu atau kelompok, seperti uang, properti, dan aset keuangan lainnya. Modal ini merupakan bentuk yang paling jelas dan mudah diukur, dan sering kali menjadi dasar bagi akumulasi dan distribusi kekuasaan dalam

masyarakat kapitalis. Modal ekonomi memungkinkan individu untuk mengakses barang dan jasa, serta mempengaruhi posisi mereka dalam hierarki sosial. Secara kesiapan modal ekonomi, Agil Siradj Ahmad sangat mumpuni dalam memenuhi modal tersebut, terlihat dalam beberapa usaha dan Upaya profesi Agil Siradj Ahmad merupakan pengusaha muda yang bergerak di bidang entertainen dan sport. Sehingga kesiapan dan kepunyaan dalam dimensi modal ekonomi sangat membantu Agil Siradj Ahmad melanggengkan dirinya menjadi Caleg Dapil I Kolaka yang terpilih dalam pemilu 2024.

Modal Budaya mencakup pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan preferensi budaya yang diperoleh individu melalui proses sosialisasi. Bourdieu membagi modal budaya menjadi tiga bentuk: embodied (internalisasi pengetahuan dan keterampilan), objectified (benda budaya seperti buku, karya seni), dan institutionalized (kualifikasi akademis dan gelar). Modal budaya sangat penting dalam menentukan posisi sosial seseorang, terutama dalam arena seperti pendidikan dan seni, di mana pengetahuan dan keterampilan dihargai. Agil Siradj Ahmad merupakan alumni Fakultas Hukum UMI Angkatan 2020, dalam ranah ini Agil Siradj Ahmad memiliki pengetahuan yang cukup terkait persoalan hukum sehingga akan membantu proses pembacaan realitas atas setiap permasalahan dalam konteks hukum di Kabupaten Kolaka serta keterampilan retorik dan organisasi Agil Siradj Ahmad sudah di jalani semenjak bangku SMA sampai saat ini yang menjadi modal keterampilan kuat nya dalam berhadapa langsung ke ranah publik maupun masyarakat.

Modal Sosial adalah jaringan hubungan sosial dan koneksi yang dimiliki individu atau kelompok. Modal ini mencakup sumber daya yang dapat diperoleh melalui keanggotaan dalam kelompok, akses ke jaringan profesional, dan hubungan sosial yang dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan. Modal sosial memberikan keuntungan dalam berbagai arena sosial, termasuk politik, bisnis, dan komunitas, di mana koneksi dan dukungan kolektif memainkan peran penting. Tidak bisa di pungkiri, relasi atau koneksi dari Agil Siradj Ahmad sangatlah luas, Agil Siradj Ahmad merupakan tokoh pemuda yang selalu terjun dalam pengembangan potensi kepemudaan khususnya olahraga dan sosial. Di samping itu ia merupakan anak kandung dari mantan Bupati Kolaka 2 periode yakni Ahmad Safei yang memiliki konektivitas dan jaringan yang dia gunakan dalam pertarungan Pilcaleg DPRD Dapil I Kabupaten Kolaka.

Modal Simbolik merujuk pada prestise, reputasi, dan pengakuan yang dimiliki individu atau kelompok. Modal ini bersifat abstrak tetapi sangat berpengaruh dalam menentukan status sosial dan kekuasaan. Pengakuan

simbolik bisa berasal dari berbagai sumber, seperti gelar akademis, penghargaan, atau status profesional, yang memberikan legitimasi dan otoritas kepada pemiliknya. Secara simbolik Agil Siradj Ahmad mendapatkan prestise dari kalangan masyarakat Kolaka sebagai Tokoh Pemuda yang Agil Siradj Ahmad dapatkan dari struktur organisasi sebagai pimpinan Lembaga atau institusi yang Agil Siradj Ahmad lakoni di masa lampau – saat ini di antaranya Ketua Banteng Muda Indonesia(BMI Kolaka) serta Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten (AFKAB Kolaka), secara darah biologis Agil Siradj Ahmad merupakan anak bungsu dari aktor politik (Bupati 2 Periode sekaligus Caleg DPR – RI terpilih Dapil Sulawesi Tenggara) dan mantan birokrat sehingga elektabilitas atau ketenarana Agil Siradj Ahmad mampu menyayangi aktor politik lain nya dalam Pilcaleg DPRD Dapil I Kabupaten Kolaka.

Bourdieu berargumen bahwa berbagai bentuk modal ini saling berhubungan dan dapat dikonversi satu sama lain. Misalnya, modal ekonomi dapat digunakan untuk memperoleh modal budaya melalui pendidikan, atau modal sosial dapat digunakan untuk membangun reputasi dan modal simbolik. Interaksi dan konversi modal ini terjadi dalam berbagai arena sosial, di mana individu dan kelompok berkompetisi untuk memperoleh dan mempertahankan posisi kekuasaan.

Dengan demikian, konsep modal menurut Bourdieu memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana sumber daya sosial, ekonomi, dan budaya berperan dalam struktur dan dinamika kekuasaan. Konsep ini membantu menjelaskan bagaimana ketidakesetaraan sosial direproduksi dan dipertahankan, serta bagaimana individu dan kelompok dapat memanfaatkan berbagai bentuk modal untuk mengubah posisi mereka dalam hierarki sosial.

Hubungan habitus dengan arena, Shusterman menyatakan bahwa keduanya memiliki jalinan makna yang saling bertautan. Berikut pernyataannya:

(Bourdieu's theory of the dynamics of habitus (not a rigidly fixed or mechanical habit)and of field not a stationary space but a dynamic field constituted by struggles over changing positions) demonstrates that social structures and identities must be understood not as static, typological, and hard-edged categories but rather as dynamic formations of organized diachronic complexity, poised between stability and change, whose edges arc best construed (in terms of non-linear dynamics) as fuzzy, shifting fractal basin boundaries between complex attractors with relatively hard cores).

(Teori Bourdieu tentang dinamika habitus dan arena, bukan ruang hampa tetapi sebuah ranah, arena, yang terkonstitusi oleh perjuangan untuk mendapatkan posisi-posisi, mendemonstrasikan bahwa struktur sosial dan identitas harus dipahami tidak secara statis, tipologik, menurut ketentuan kategoristik yang kaku, tetapi harus dipahami sebagai formasi yang dinamis dari kompleksitas diakronik yang terorganisasi, berada seimbang diantara stabilitas dan perubahan, dengan masing-masing sisi yang ditafsirkan sebagai sesuatu yang kabur, menggeser tepian batas antara kemenangan yang kompleks dengan ketegaran relatif).

Bourdieu juga menyatakan bahwa *habitus* secara erat berhubungan dengan modal (kapital), karena sebagian *habitus* tersebut berperan sebagai pengganda berbagai jenis modal yakni modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik. Dan pada kenyataannya, ia menciptakan modal simbolik. Modal dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi dan legitimit. Modal simbolik merupakan modal yang dapat ditukar dan membawa posisi yang dapat memunculkan kekuasaan, yakni kekuasaan untuk merepresentasikan dunia sosial yang legitimit atau kekuasaan simbolik. Fauzi Fashri juga mencatat, mereka yang menguasai keempat modal tersebut dalam jumlah yang besar akan memperoleh kekuasaan yang besar pula. Dengan demikian, modal harus ada dalam sebuah ranah (arena) agar ranah memiliki daya-daya yang memberikan arti. Karakteristik modal dihubungkan dengan skema *habitus* sebagai pedoman tindakan dan klasifikasi dan ranah (arena) selaku tempat beroperasinya modal. Bourdieu juga meyakini bahwa kekuasaan bersifat tidak sederhana, dan sistemik atau bukan merupakan perkara personal, sebagaimana ditulis Craig Calhoun.

### **2.3. Skema Pikir**

Agil Siradj Ahmad lahir pada tanggal 12 Desember 2001, ia merupakan anak bungsu dari Mantan Bupati Kolaka 2 periode yakni Ahmad Sjafei. Ia menempuh karir pendidikan dasar mulai Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Kolaka dan terakhir di tahun 2024 melulusi jenjang S1 nya di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Kota Makassar. Saat ini, beliau bergelut dalam dunia Kewirausahaan/Pengusaha di berbagai sektor. Beliau juga merupakan Ketua Banteng Muda Indonesia Kabupaten Kolaka dan Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten Kolaka.

Kemudian dengan modal dan kesiapan beliau, beliau memberanikan bertarung dalam Pemilihan Calon Legislatif Dapil 1 Kabupaten Kolaka yang melingkupi wilayah Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Latambaga melalui Partai Indonesia Perjuangan – Indonesia (PDIP). Pilcaleg 2024 kemarin ia mampu menjadi jawara menduduki kursi

pertama dengan perolehan suara individu sebanyak 3.493 dan suara partai sebanyak 6944.

Kehadiran Agil di arena politik juga ditandai oleh strategi yang cerdas dalam membangun modal dan habitusnya dalam arena pertarungan. Memahami pentingnya modal, ia menjalin hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis. Jaringan ini tidak hanya memperkuat posisinya dalam hierarki politik tetapi juga memungkinkan dia untuk mendapatkan dukungan luas untuk inisiatif-inisiatifnya. Keseluruhan Modal Agil Siradj Ahmad juga memainkan peran penting dalam mobilisasi sumber daya dan dukungan politik saat kampanye atau pelaksanaan program-program nya.

Agil Siradj Ahmad juga menunjukkan kemampuan adaptasi dalam menghadapi dinamika politik yang cepat berubah. Ketika kondisi sosial dan politik mengalami perubahan, ia mampu merespon dengan cepat dan menyesuaikan strategi politiknya. Hal ini mencerminkan fleksibilitas habitusnya yang dinamis dan kemampuannya untuk mengkonversi berbagai bentuk modal sesuai kebutuhan. Misalnya, dalam situasi krisis, Agil sering kali menggunakan modal simboliknya, seperti reputasi dan pengakuan publik, untuk menggali dukungan dan mengimplementasikan kebijakan darurat yang efektif.

Keseluruhan perjalanan politik Agil Siradj Ahmad menunjukkan bagaimana seorang individu dapat memanfaatkan berbagai bentuk modal dan habitus untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan serta membawa perubahan positif dalam masyarakat. Kepemimpinan dan dedikasinya menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa dengan visi yang jelas, strategi yang tepat, dan komitmen terhadap nilai-nilai sosial, seorang politisi dapat membuat perbedaan yang signifikan. Agil adalah contoh nyata dari bagaimana modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik dapat digunakan secara efektif dalam arena politik untuk menciptakan pengorganisasian dalam masyarakat.

Pemuda 22 tahun tersebut mampu menjadi pemenang baru dan pendatang baru dalam pemilu DPRD Kabupaten Kolaka. Aktivitas kepemudaan Agil Siradj Ahmad sudah dilakoni sejak di bangku SMA. Kegiatan pengembangan dalam olahraga futsal merupakan salah satu modal beliau mendapat simpati dan dorongan terhadap masyarakat khususnya pemuda di kabupaten Kolaka. Di samping itu, putra Ahmad Safei Mantan Bupati Kolaka 2 periode tersebut sering kali terlibat dalam aktivitas sosial.

Kabupaten Kolaka merupakan Kabupaten Kolaka adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten Kolaka berada di kecamatan Kolaka. Kabupaten Kolaka (induk) telah dua kali mengalami pemekaran, yakni Kabupaten Kolaka Utara, dan yang terbaru adalah Kabupaten Kolaka Timur yang telah disahkan pada akhir tahun 2012. Pasca pemekaran, kabupaten Kolaka mencakup daratan dan

kepulauan yang memiliki wilayah seluas 3.283,59 Km<sup>2</sup>, dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas ± 15.000 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 2021 berjumlah 238.352 jiwa, dengan kepadatan 73 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kabupaten Kolaka adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten ini terletak di pesisir barat pulau Sulawesi, dengan ibu kota di Kolaka. Dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan kekayaan sumber daya alamnya, Kolaka menawarkan pemandangan alam yang luar biasa, mulai dari pegunungan yang hijau hingga pantai-pantai yang eksotis.

Kabupaten ini juga memiliki iklim tropis yang memungkinkan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna. Ekonomi Kabupaten Kolaka sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan, pertanian, dan perikanan. Pertambangan nikel merupakan salah satu kontributor terbesar bagi perekonomian daerah ini, dengan banyak perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut. Selain itu, sektor pertanian juga berkembang pesat dengan komoditas utama seperti kakao, kelapa sawit, dan cengkeh. Perikanan, baik laut maupun darat, juga memainkan peran penting dalam menopang ekonomi lokal, dengan berbagai produk laut yang diekspor ke luar daerah.

Kolaka juga memiliki kekayaan budaya yang unik, dengan beragam suku dan tradisi yang hidup berdampingan. Budaya dan tradisi lokal masih sangat dijaga dan dipertahankan oleh masyarakatnya. Upacara adat, tarian tradisional, dan musik daerah sering kali ditampilkan dalam berbagai festival dan acara kebudayaan, yang tidak hanya memperkuat identitas lokal tetapi juga menarik wisatawan dari luar daerah. Suku Tolaki adalah salah satu suku asli yang berperan besar dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah ini.

Dalam pemilihan umum DPRD Kolaka 2024 yang lalu, Peta sebaran dapil di kelompokkan menjadi 4 dapil dan memperebutkan 30 Kursi. Berikut pembagiannya :

<b>No</b>	<b>Dapil</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Perolehan kursi</b>
<b>1</b>	<b>I</b>	Kolaka, Latambaga	<b>9</b>
<b>2</b>	<b>II</b>	Wundulako, Pomala, baula	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>III</b>	Watubangga, Tanggetada, Toari, Polinggona	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>IV</b>	Wolo, Samaturu, Iwoimenda	<b>7</b>

Keberhasilan Agil Siradj Ahmad semakin menguatkan dugaan bahwa kesiapan modal dan strategi politik sangat berperan penting dalam keberhasilan mempertahankan kemenangan dalam pemilihan legislatif 2024 kabupaten Kolaka . Hal inilah sebagai fenomena politik yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam, selain melacak proses politik selama pelaksanaan pemilu, uraian mengenai kesiapan modal dan strategi politik

Agil Siradj Ahmad sebagai salah satu jawara sekaligus pendatang baru dalam pemilihan legislatif diperlukan untuk mengetahui strategi politik dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan yang paling efektif dalam kontestasi politik di ranah lokal.

Pendekatan Pierre Bourdieu yang mencakup konsep habitus, modal, dan arena sangat tepat dalam menganalisis modal dan strategi Agil Siradj Ahmad dalam Pilcaleg Kolaka 2024. Pertama, konsep habitus, yang merujuk pada disposisi sosial dan kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman hidup individu, dapat membantu kita memahami bagaimana latar belakang sosial, pendidikan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh Agil Siradj Ahmad mempengaruhi cara ia berinteraksi dengan pemilih dan menyusun kampanyenya. Habitus Agil yang mencerminkan kedekatannya dengan masyarakat Kolaka dan pemahamannya terhadap kebutuhan serta aspirasi lokal menjadi modal penting dalam menarik simpati dan dukungan pemilih.

Kedua, konsep modal Bourdieu yang terdiri dari modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik sangat relevan dalam melihat sumber daya yang dimiliki oleh Agil Siradj Ahmad. Modal ekonomi merujuk pada sumber daya finansial yang memungkinkan Agil mendanai kampanye dan aktivitas politiknya. Modal sosial mencakup jaringan dan hubungan yang dimilikinya dengan tokoh-tokoh penting, kelompok masyarakat, dan institusi yang dapat memberikan dukungan dan memobilisasi massa. Modal budaya mencakup pengetahuan, pendidikan, dan keahlian yang membuat Agil tampil sebagai kandidat yang kompeten dan kredibel di mata pemilih. Terakhir, modal simbolik meliputi reputasi, legitimasi, dan prestise yang dimiliki Agil, yang dapat meningkatkan pengaruhnya dalam arena politik.

Ketiga, konsep arena atau medan Bourdieu, yang menggambarkan ruang sosial di mana individu atau kelompok berkompetisi untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh, sangat relevan dalam konteks Pilcaleg Kolaka 2024. Arena politik Kolaka merupakan medan di mana berbagai aktor politik dengan modal yang berbeda-beda berinteraksi dan bersaing. Dalam arena ini, Agil Siradj Ahmad perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk memanfaatkan modal yang dimilikinya dan menavigasi dinamika kekuasaan serta persaingan politik. Dengan memahami posisi dan kekuatan relatifnya dalam arena ini, Agil Siradj Ahmad dapat menyusun strategi yang tepat untuk mengoptimalkan modalnya dan meraih kemenangan dalam Pilcaleg. Pendekatan Bourdieu ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif dan mendalam untuk memahami modal dan strategi politik yang digunakan oleh Agil Siradj Ahmad.

Dengan mengintegrasikan konsep-konsep Bourdieu tentang habitus, modal, dan arena, analisis ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Agil Siradj Ahmad memanfaatkan latar belakang sosial, jaringan, serta sumber daya yang dimilikinya untuk merancang strategi yang efektif dan memenangkan persaingan politik

dalam Pilcaleg Kolaka 2024. Pendekatan ini tidak hanya mengungkap dinamika kekuasaan dan persaingan di arena politik lokal tetapi juga menyoroti pentingnya interaksi antara modal yang berbeda-beda dalam membentuk keberhasilan politik seorang kandidat.

## 2.4. Skema Penelitian

